

POLITIK KEBUDAYAAN PILPRES



Dr. H. Yaya Mulyana A. Aziz, M.Si.
(Dosen Fisip dan Pascasarjana Unpas)

Sebagai etnis kedua terbesar di Indonesia, bahkan dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sangat wajar jika ada keinginan sebagian masyarakat Sunda untuk hadirnya kepemimpinan Sunda dalam kancah nasional merupakan perasaan yang sentimental, primordial, dan nepotism. Seandainya sudah jadi di tampuk kepemimpinan nasional itu barangkali ada kebanggaan atau "kareueus" atas eksistensi Ki Sunda dalam kancah kepemimpinan nasional.

Kalau kita hitung- hitungan dari 6 presiden Indonesia yang lalu termasuk sekarang Jokowi hanya BJ Habibie yang bukan orang Jawa, itupun hadir dalam situasi "darurat". Demikian juga dalam posisi wapresnya terselang hanya Adam Malik, Umar Wirahadikusumah dan Jusuf Kalla yang dari etnis non-Jawa. Dilihat dari situ tentu bukan suatu kebetulan jika Jawa begitu dominan.

presiden Jawa

Dalam kaitan ini menarik apa yang dikatakan seorang Indonesianis, Lance Castles, yang argumentasinya meliputi tiga dalil pokok. Pertama, sekalipun tidak matematis mayoritas, suku Jawa tetap dominan, karena konsentrasi kekuasaan sipil dan militer di tangan segelintir kecil orang, yang sejak kemerdekaan adalah orang Jawa atau paling sedikit orang non-Jawa yang terasimilasi dalam elit yang "dijawakan"

(Istri Jawa, Ibu Jawa, ucap kan bahasa Indonesia dengan akhiran -ken, dsb.).

Kedua, di Indonesia terdapat dua budaya politik dimana suku Jawa berada terutama di satu pihak yang bisa di sifati birokrasi-sentralistis dan demokratis enterpreneurial atau abangan/priyayi. Dwitunggal Soekarno-Hatta didasawarsa pertama kemerdekaan akhirnya gagal menjembatani jurang ini. Ekspresinya di pemilu 1955, sekalipun partai yang eksplisit etnis/keda-

erahan tidak signifikan adalah kontras tiga partai besar yang dominan di Jawa Tengah dan Jawa Timur (PNI, NU, PKI) dan lawan mereka Masyumi yang mendapat sebagian besar suaranya di Jawa Barat dan luar Jawa.

Ketiga, argumen lain adalah ada ketimpangan atau kontradiksi antara ekonomi Jawa dan luar Jawa. Secara demikian terlihat bahwa Jawa sangat rakus dalam mengeruk semua sumber daya Indonesia. Hal ini bukan saja karena 60% penduduk Indonesia di sini sehingga wajar jika 70% lebih perputaran uang ada di sini tetapi juga karena pola pembangunan ekonomi yang terlalu terpusat di sini menyebabkan putra terbaik daerah terserap disini guna ikut menikmati kejayaan Jawa. Jawa kemudian menjadi impian putra daerah dan membahayakan untuk dapat meraup keberhasilan. Akan tetapi, di balik gemerlap Jawa itu, didalamnya terselip sisi gelapnya karena kegemerlapan itu diperoleh sebagian dengan pengelapan serta eksploitasi sebagian manusia khususnya elite Jakarta yang mempunyai palu kekuasaan serta akses terhadapnya sehingga dengan mudah mengeruk dan memanipulasi aset-aset ekonomi tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa melihat dan berempati terhadap kondisi dan nasib daerah.

Memang fakta tidak bisa dinafikan bahwa cara pandang ini tentu sangat primordialistik. Tetapi fakta juga bahwa dalam cara pandang budaya politik versi Gabriel Almond antara budaya politik parokial, kaula dan partisipan dalam waktu bersamaan masih hadir

dalam perilaku budaya politik kita hari ini. Atau dalam perspektif William Liddle antara budaya politik tradisional dan modern keduanya hadir bersamaan justru di tengah infrastruktur politik yang sangat modern, tetapi sikap dan perilaku budaya tradisional dan kaula masih tetap kuat bercokol. Menurut Karl D. Jackson (2008), budaya Jawa mempunyai peran yang cukup besar dalam memengaruhi budaya politik di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik.

Hal ini misalnya dapat kita lihat dalam fenomena pilkada serentak di Jawa Tengah dan Jawa Timur di mana sejak jejak sejarah dominasi PNI di Jawa Tengah dan NU di Jawa Timur benang merahnya masih tetap tidak berubah sejak pemilu pertama tahun 1955. Barangkali hanya ornament, "rule of the game" nya dan sistemnya saja yang berubah tetapi substansi dan perilaku budaya politiknya sama sekali tidak bergeser. Fenomena ini yang sangat berbeda dengan perilaku dan budaya politik di Jawa Barat di mana sejak Pemilu 1955 itu sudah menunjukkan budaya politik yang lebih egaliter dan partisipan sehingga faktor ketokohan atau figur tidak terlalu berpengaruh dominan. Barangkali karena sikap kritis dan egaliter itulah sering di Jawa Barat sulit diambil kesepakatan bersama terhadap figur atau tokoh yang disepakati dan dido-

rong bersama karena setiap kelompok masyarakat mempunyai persepsi dan tokohnya sendiri. Terlebih di Jawa Barat ini sedikitnya ada tiga sub kultur yaitu Priangan, Cirebonan dan Bodebekpurwasuka yang lebih heterogen sehingga ketika dimunculkan satu nama belum tentu disepakati oleh sub kultur lainnya.

Tidak berlebihan jika hal ini juga karena berpijak dalam akar filosofi kepemimpinan Sunda tentang Tri Tangtu di buana semacam trias politiknya Montesquie bahwa ada tiga tipe kepemimpinan Sunda yaitu Ratu, Rama dan Resi yang masing masing mempunyai karakteristik dan pengikutnya sendiri. Hal ini berbeda dengan filosofi kepemimpinan Jawa yang lebih homogeny dan menisbahkan adanya manunggaling kawula lan gusti. Bahkan di kalangan Sunda yang sering kali lebih keras melakukan kritik terhadap sosok kepemimpinan Sunda justru datang dari kalangan masyarakat Sunda sendiri bukan dari luar. Misalnya ketika Yogie S. Memet jadi Mendagri dengan membawa beberapa staf dari Gedung Sate dalam kementeriannya justru yang berteriak "dijabarkan" adalah orang Sunda sendiri, sehingga ada pameo, "ku batur ulah ari ku sorangan henteur". Dan akhirnya ketika ada orang Sunda yang "manggung" di kancah politik nasional dia merasa karena usahanya sendiri dan tidak merasa berhutang budi terhadap organisasi atau masyarakat Sunda. Meskipun ketika menghadapi kesulitan dan masalah baru sowan mendandaing tokoh-tokoh Sunda.

Seni Berpolitik Jawa- Sunda

Ketimbang terus mengeluh dan memelas, jika ada niat dan tekad untuk memunculkan kepemimpinan Sunda saatnya sekarang untuk bertindak dan bergerak. Seperti dikatakan Didin Maolani dalam Sawala Poltik di PR, 27/4/2018, tidak ada kata terlambat untuk berbuat ketimbang tidak berbuat sama sekali. Selanjutnya menurut UU Rukmana isu cawapres harus terus "digandengkeung". Dalam bahasa sekarang harus terus menggoreng isu ini untuk menjadi viral di medsos. Sebab politik sebagai *the art of possibility* tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin terjadi asal kita punya tekad dan perjuangan yang dilakukan secara serius dan sistematis. Buktinya, seorang Jokowi yang jualan mebel bisa duduk dalam kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, semuanya kembali pada kesungguhan elite Sunda sendiri untuk mendorong kepemimpinan nasional ini. Jangan-jangan keinginan ini hanya romantisme dan aspirasi segelintir elite saja sedangkan sebagian masyarakat lainnya tidak ambil peduli dan apalagi generasi millennium malah cuek-cuek saja dengan isu ini.

Di sinilah perlunya suatu upaya yang serius dari kalangan elite Sunda itu dengan membangun suatu strategi politik untuk mewujudkan mimpi itu dan sekaligus strategi politik kebudayaan untuk mendapatkan basis dukungan dan perubahan *mindset* berpikir masyarakat Sunda yang semua dilandasi sebagai seni berpolitik dan taktik untuk mendapatkan

pertarungan. Sebab dalam politik istilahnya tidak ada "makan siang gratis" tetapi untuk "siapa mendapatkan apa". Strategi politik berarti setiap rencana, langkah dan sikap dengan menggalang dukungan politik maksimal baik lewat infra struktur seperti dukungan dari Ormas, tokoh masyarakat, kampus, LSM, mahasiswa, kelompok perempuan serta media massa termasuk medsos. Maupun dukungan dari supra struktur politik, baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti lewat lobi ke elite politik, pemerintah, DPR dan DPRD.

Sedangkan strategi melalui politik kebudayaan berarti harus ada pemihakan dan rekayasa secara sistematis dalam kerangka kebijakan untuk merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging. Memang tidak mudah tetapi bukan mustahil untuk dilakukan selama politik kebudayaan itu konsisten dilakukan. Dalam tahap awal perlu dilakukan sedikit pemaksaan dan ini menjadi domain pemerintahan tetapi selanjutnya jika itu positif dan berguna bagi masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan baru masyarakat seperti "mudahnya" peralihan bayar tunai di tol ke *e-toll*.

Politik kebudayaan ini penting untuk mengubah *mindset* dan perilaku budaya masyarakat. Misalnya bahwa pandangan bahwa politik itu kotor sehingga harus ditinggalkan dirubah menjadi asumsi politik itu penting karena menjadi hajat hidup orang banyak sehingga orang-orang baik dan punya idealisme harus masuk

dan merebutnya agar dunia politik tidak didominasi orang-orang oportunistis dan jahat.

Penutup

Ki Sunda cawapres "manggung makalangan", karena disadari atau tidak cawaprenya Prabowo yaitu Sandiaga Uno juga ada darah Sunda dari ibunya yang asli Kuningan dan cawapresnya Jokowi yaitu KH Ma'ruf Amien adalah juga dari Banten sehingga rasa kesundaan tidak sirna sama sekali. Keduanya mengisyaratkan koalisi Jawa-Sunda dan mengakhiri gap kultural pasca "perang Bubat", setelah sejak Kepemimpinan era Kang Aher dibuat perdamaian dengan pemimpin Keraton Yogya dan Gubernur Jatim Sukarwo untuk mengakhiri luka lama dari sejarah ketegangan Sunda-Jawa dengan secara simbolis di ketiga wilayah itu masing-masing dibuat nama jalan, disekitar Gedung sate sekarang ada nama jalan Hayam Wuruk dan di kedua daerah Jawa itu ada nama jalan Siliwangi dan Pajajaran.

Pada akhirnya dalam Pilpres sekarang, siapapun yang akan terpilih, "darah" Ki Sunda masih akan tetap mengalir. Jadi isu ini bukan sekadar "ngadu bako" belaka. *Wallahu'alam bisshowab.* (Yaya Mulyana A. Aziz: Ketua Litbang Paguyuban Pasundan dan Dosen Fisip Unpas)

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov Hans dan Sven Cederrrot. 2003. Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta. 2003. Yayasan Obor

- Effendy, Bachtiar, Kepemimpinan Nasional Paska Soeharto: Elite Politik yang Tidak Bersatu dan Tak Mampu Berembug, Seminar Nasional XVI AIPI, Malang, 2002.
- Fitriyah, strategi Penyelesaian Krisis Kepemimpinan Sipil di Indonesia, Seminar Nasional XVI AIPI, Malang, 23-24 Juli 2002.
- Rasyid, M. Ryaas, Makan Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Wydia, Jakarta, 2000.
- Salahudin, Asep, Sufisme Sunda, Hubungan Islam dan Sunda dalam Masyarakat Sunda, Nuansa cendikia, Bandung, 2017.
- Setiawan, Hawe (Ed.), Sosok Pemimpin Sunda: Dalam Gagasan dan Pengalaman, Paguyuban Pasundan, Bandung, 2012.
- Surbakti, Ramlan, Implikasi Pemilihan presiden Secara Langsung, Malang Agustus 2000.
- Tataq Chidmat, Kritik Terhadap Pemilihan Langsung, Pustakan Wydyatama, Yogyakarta, 2004
- MBM Tempo, 30-6-2002.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? (QS. al-Nisa: 144)



Keluarga Besar
**FAKULTAS ILMU SENI DAN SASTRA
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Mengucapkan Selamat dan Sukses

**KEPADA
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG II 2018-2019**

*Dekan
ttd*

Dr. Hj. Senny Suzana Alwasilah, S.S., M.Pd.